

Pencemaran Limbah Terjadi Tiap Tahun

Seorang nelayan di Tanjung Bemban, Kecamatan Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau, Rukimin (52), menyekop cairan limbah minyak hitam (sludge oil) yang mencemari pesisir Tanjung Bemban. Panas terik membuat minyak menguap. Baunya menyengat hidung. Sarung tangan yang digunakan saat menyekop minyak pun tak bertahan lama dan cepat robek karena gesekan tangan dengan pegangan sekop.

Menurut Rukimin, yang juga Ketua RT 01 RW 1, Kelurahan Batu Besar, setiap hari ada 10 nelayan membersihkan limbah minyak hitam. Limbah minyak hitam yang mencemari pesisir Tanjung Bemban berasal dari kapal-kapal tanker yang membuang minyak dari perairan internasional di Selat Singapura.

Para nelayan itu diminta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Kota Batam untuk membantu membersihkan limbah. Limbah masuk ke pesisir sejak awal Januari 2010. Menurut Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo, sekitar 46 ton minyak hitam sudah terkumpul dalam kantong-kantong besar sampai akhir Januari. Diperkirakan jumlah limbah minyak hitam itu 60-65 ton.

Biaya yang harus ditanggung tidak kecil. Menurut Dendi, biaya pembersihan limbah minyak hitam, seperti biaya plastik dan upah nelayan yang membersihkan, sudah mencapai Rp 96 juta.

Setelah terkumpul, limbah minyak hitam diangkut ke kawasan pengelolaan limbah industri (KPLI) di Kabil Batam. Jika pihak KPLI tidak dapat memusnahkan, limbah minyak hitam dikirim ke Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Biaya transportasi limbah ke Cileungsi mencapai 60-70 dollar Singapura per ton," kata Dendi. Biaya pemusnahan di PPLI diperkirakan mencapai 80-120 dollar AS per ton.

Meski biaya tinggi, kegiatan pembersihan limbah minyak hitam di wilayah pesisir Pulau Batam menjadi ritual tahunan. Saat musim utara, yaitu angin bertiup kencang dari arah utara, awak buah kapal-kapal tanker membuang limbah minyak.

Akibatnya, minyak hitam yang terbawa arus ombak laut menghampiri pesisir Pulau Batam, seperti Pantai Nongsa. Bahkan, pencemaran minyak hitam sering kali terjadi di Pantai Trikora, Bintan.

Seorang nelayan di Tanjung Bemban, Boyo (45), menuturkan, ia sudah terbiasa dengan limbah minyak hitam. "Minyak hitam itu setiap tahun datang. Lama-kelamaan minyak akan hilang terbawa arus," kata Boyo.

Namun, ia tidak melaut untuk mencari ikan jika minyak hitam datang. "Kalau kena jaring bisa rusak dan harus diganti," katanya.

Sebagai gantinya, Boyo menggunakan bubu atau jaring kawat yang diletakkan di dasar laut di dekat pesisir. Dengan demikian, minyak hitam yang berada di permukaan laut tidak mengenai jaring bubu.

Sangat merugikan

Dampak limbah minyak hitam itu sangat besar. Selain menghabiskan biaya untuk pembersihan, pesisir dan pantai yang menjadi obyek wisata menjadi kotor dan tercemar. Saat pantai kotor, wisatawan enggan datang sehingga bisnis para pelaku pariwisata, seperti tempat makan serta penyewaan pelampung, terhenti sesaat.

Limbah minyak hitam juga mengganggu aktivitas nelayan. Plankton dan biota laut di sekitar pesisir pantai terancam mati. Akibatnya, ikan menjadi sulit didapat.

Dampak lain, wilayah Indonesia bisa dianggap sebagai tempat pembuangan limbah karena setiap kali ada kasus pembuangan limbah dari kapal-kapal tanker, tidak ada upaya untuk mengusut. Memang tidak mudah untuk mengusut. Namun, setidaknya pemerintah pusat perlu melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, untuk mencegah pembuangan minyak hitam dari kapal-kapal tanker di Selat Singapura serta Selat Malaka.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Malaysia, termasuk Singapura, gencar mempersoalkan limbah asap waktu terjadi kebakaran hutan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau Awaluddin menyatakan, upaya pencegahan pembuangan dan pencemaran limbah minyak hitam di perairan Selat Singapura, termasuk Selat Malaka, tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendirian.

"Pembuangan minyak hitam di perairan internasional sudah terkait dengan masalah lintas negara, seperti Singapura dan Malaysia," kata Awaluddin.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga itu di bidang lingkungan hidup untuk mengatasi pencemaran dari kapal-kapal tanker di perairan internasional.

"Selama ini kerja sama di Selat Malaka hanya terbatas pada masalah keamanan, yaitu perampokan," kata Awaluddin.(FER)